



# PERSIAPAN PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI



Yogyakarta, 28 Februari 2024



# ***OVERVIEW***

## **Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

---

# HUBUNGAN SPIP MENURUT PP 60 TAHUN 2008 DENGAN FRAMEWORK PENILAIAN SPIP TERINTEGRASI

**Mandat Pimpinan Instansi Pemerintah**

**Kerangka Pikir SPIP Terintegrasi**

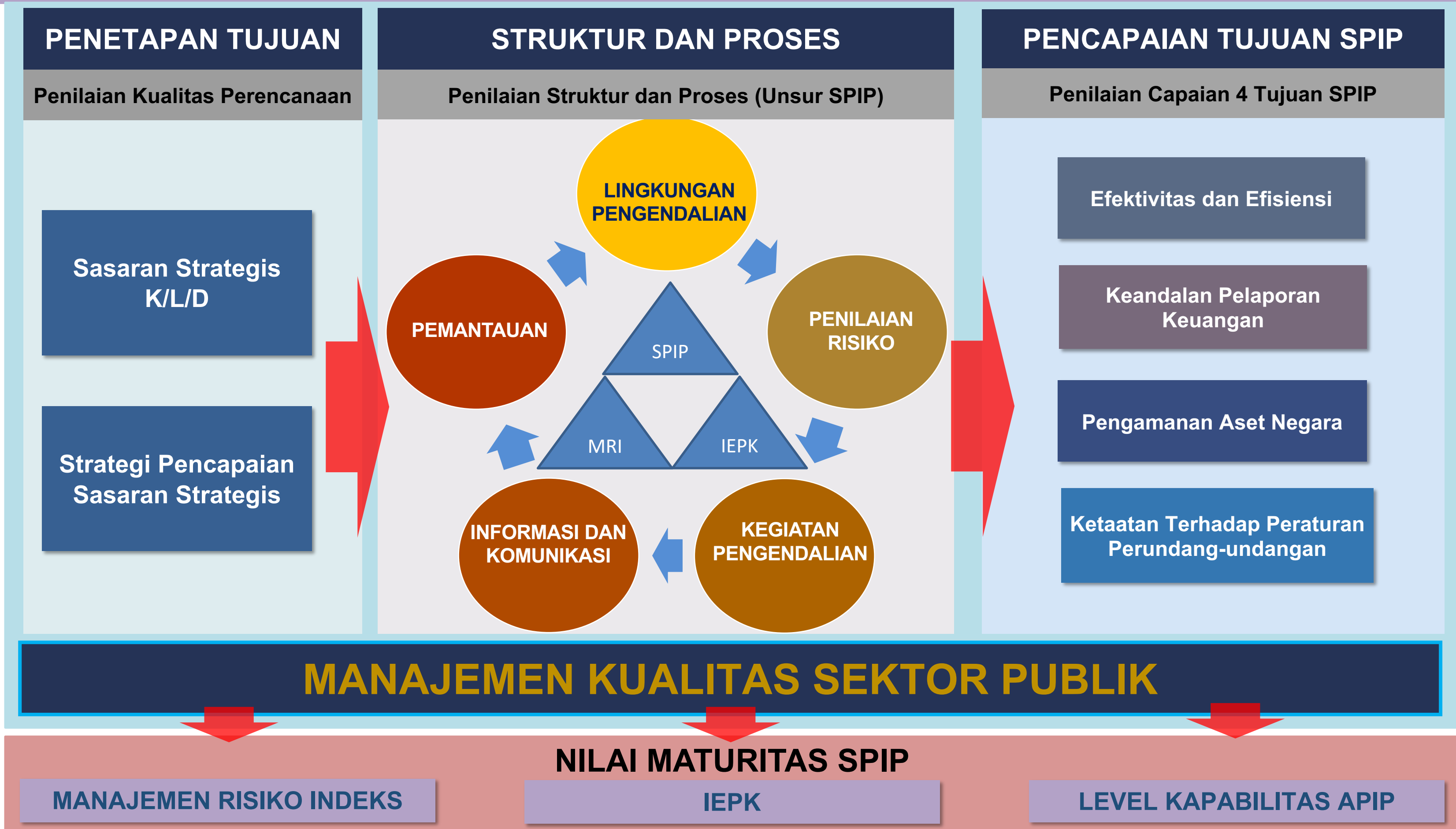
PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:



## FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

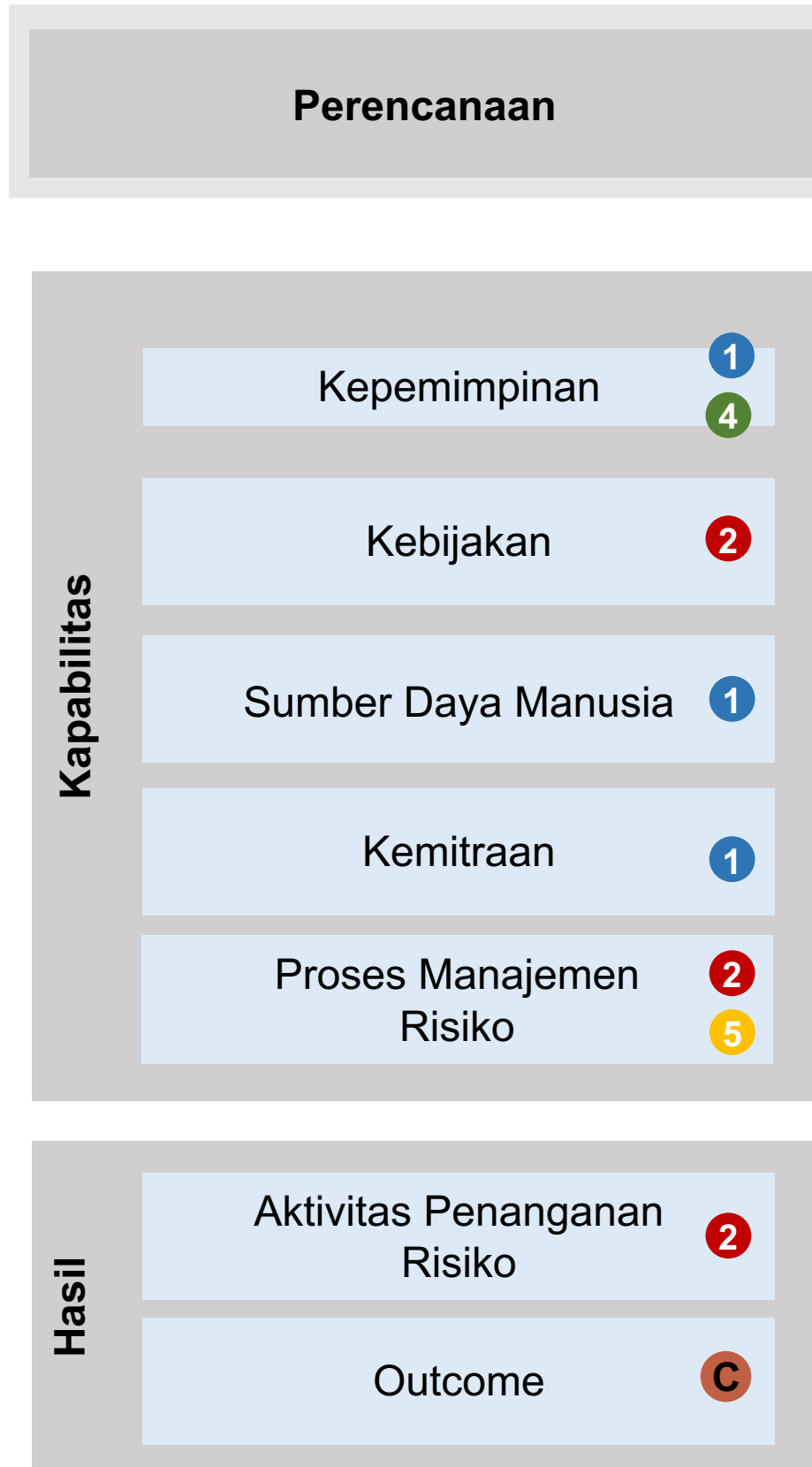


# FRAMEWORK PENILAIAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI



# INTEGRASI PARAMETER PENILAIAN

## MANAJEMEN RISIKO INDEKS



Adaptasi: HM Treasury

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



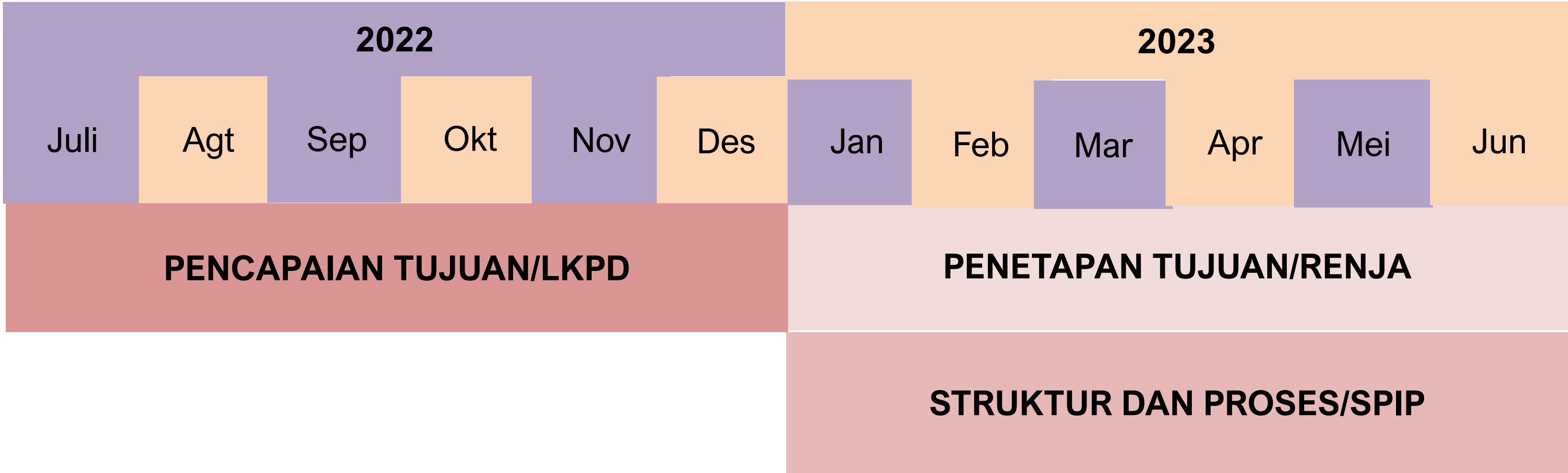
Sumber: PP No. 60 Tahun 2000 tentang SPIP

## INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI



Sumber: FRM

# WAKTU PELAKSANAAN PM/PK



## SATKER YANG DINILAI

PENILAIAN  
MANDIRI

SELURUH SATKER  
K/L/D

PENJAMINAN  
KUALITAS

SATKER WAJIB

SATKER  
PENANGGUNG JAWAB

Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan K/L/D.

Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis

- perencanaan,
- pengelolaan keuangan,
- pengelolaan aset, dan
- fungsi pengawasan internal

40%  
TOTAL  
ANGGA  
RAN

# TAHAP PERSIAPAN PENILAIAN

## a. Pembentukan Tim PM DAN PK



Tim PM Min. 1/3 pernah mengikuti diklat/bimtek SPIP & penilaian SPIP dan/atau mengikuti penugasan terkait SPIP, (Untuk Tim PK 100%)

Jumlah personil mempertimbangkan kompleksitas satker, serta pemahaman atas proses bisnis satker mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.



Penugasan kepada Tim PM dan PK didukung dengan mandat yang disampaikan secara formal ST/SK dan sejenisnya.

Penetapan siklus kegiatan, penganggaran, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan PM dan PK.



## b. Penentuan Satker Sampel PK

### Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 1

- Satker penanggungjawab perencanaan

### Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 2

- Satker penanggungjawab pengelolaan keuangan

### Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 3

- Satker penanggungjawab pengelolaan aset

### Penanggung Jawab Pencapaian Tujuan 4

- Satker pengawasan internal (APIP)

dan

**Satker - Satker wajib atas pencapaian Sasaran Strategis terpilih.**

## c. Pemaparan Rencana Penilaian



### Substansi Rencana Penilaian:

- Latar Belakang
- Tujuan dan Manfaat
- Ruang Lingkup Metodologi yang Digunakan
- Tahapan dan Jadwal Waktu
- Sistematika Pelaporan
- Rencana Kebutuhan Sumber Daya
- Susunan Tim PM dan PK

### Tujuan Pemaparan:

- Mendapatkan kesepakatan pimpinan/pejabat kunci
- Memperoleh persamaan persepsi antara assessor dengan pimpinan/pejabat kunci





# BOBOT PENILAIAN KOMPONEN

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40.00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	100.00%	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30.00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	100.00%	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>30.00%</b>
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	100.00%	



# LEVEL MATURITAS SPIP

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Optimum	$\geq 4,50$



## OPTIMUM (Level 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, dengan struktur dan proses **pengendalian telah efektif** untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta **adaptif terhadap perubahan lingkungan** organisasi.

## TERKELOLA DAN TERUKUR (Level 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, struktur dan proses **pengendalian telah efektif** namun **belum adaptif** terhadap perubahan lingkungan organisasi.

## TERDEFINISI (Level 3)

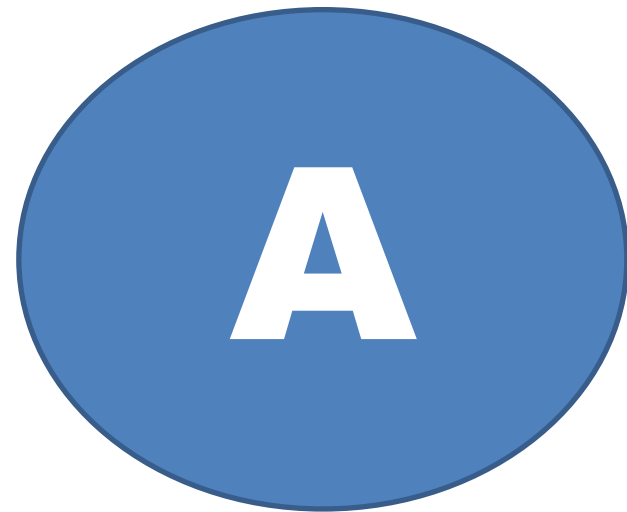
Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik** dan **strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi**, serta pelaksanaan **pengendalian telah dilaksanakan** namun **belum efektif**.

## BERKEMBANG (Level 2)

Organisasi telah mampu mendefinisikan **kinerjanya dengan baik**, namun **strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan** serta pelaksanaan **pengendalian masih sebatas pemenuhan**.

## RINTISAN (Level 1)

Organisasi **belum mampu mendefinisikan kinerjanya**, termasuk **strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya**.



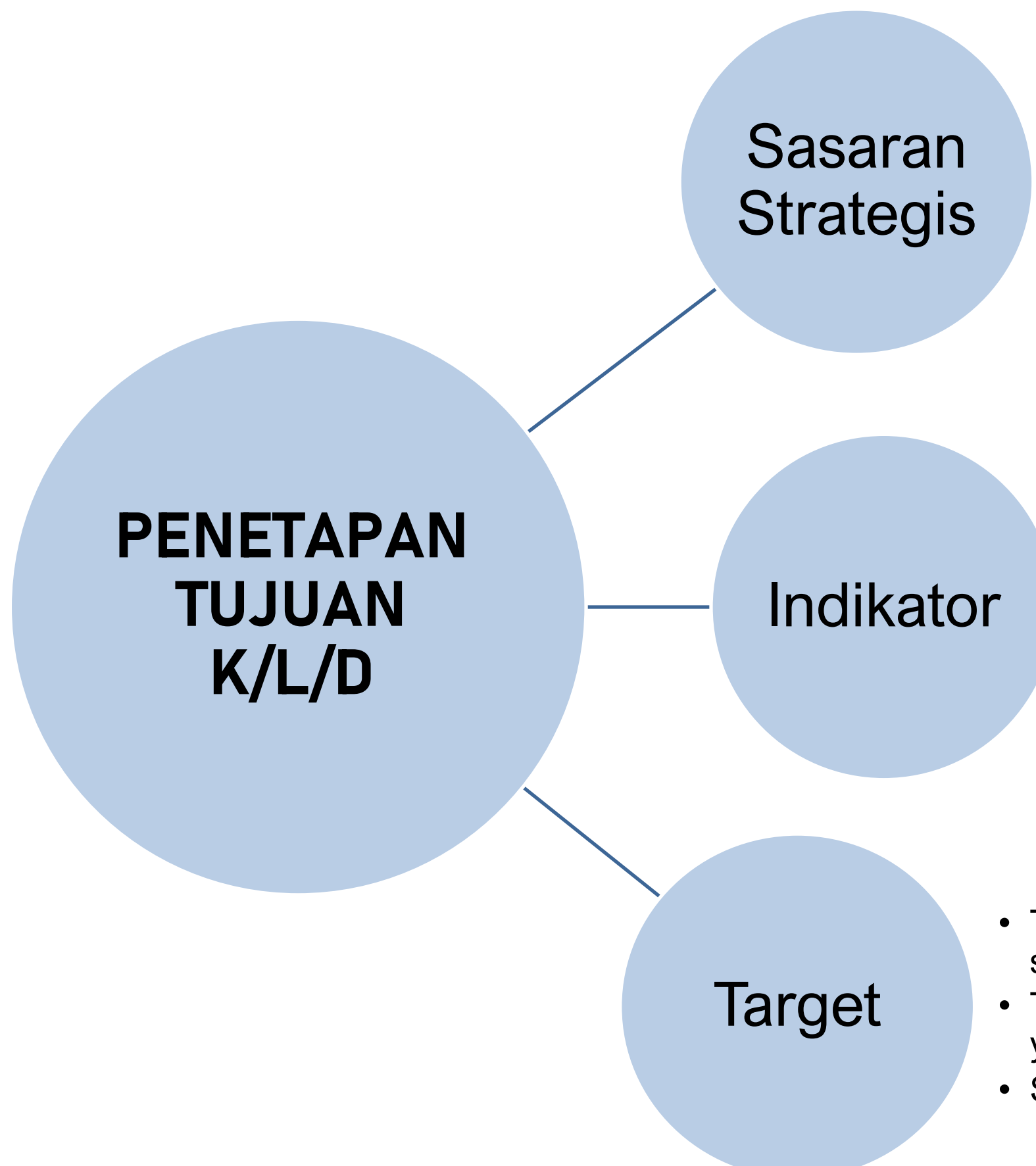
# **PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN**



**PENILAIAN  
PENCAPAIAN  
TUJUAN MEMILIKI  
BOBOT 30% DARI  
TOTAL PENILAIAN.**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40.00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	100.00%	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30.00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	100.00%	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>30.00%</b>
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	100.00%	

# PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN K/L/D



Sasaran Strategis

- Berorientasi Hasil
- Selaras dengan Visi & Misi Pemda
- Sesuai Prioritas daerah
- Mempertimbangkan isu strategis daerah

Indikator

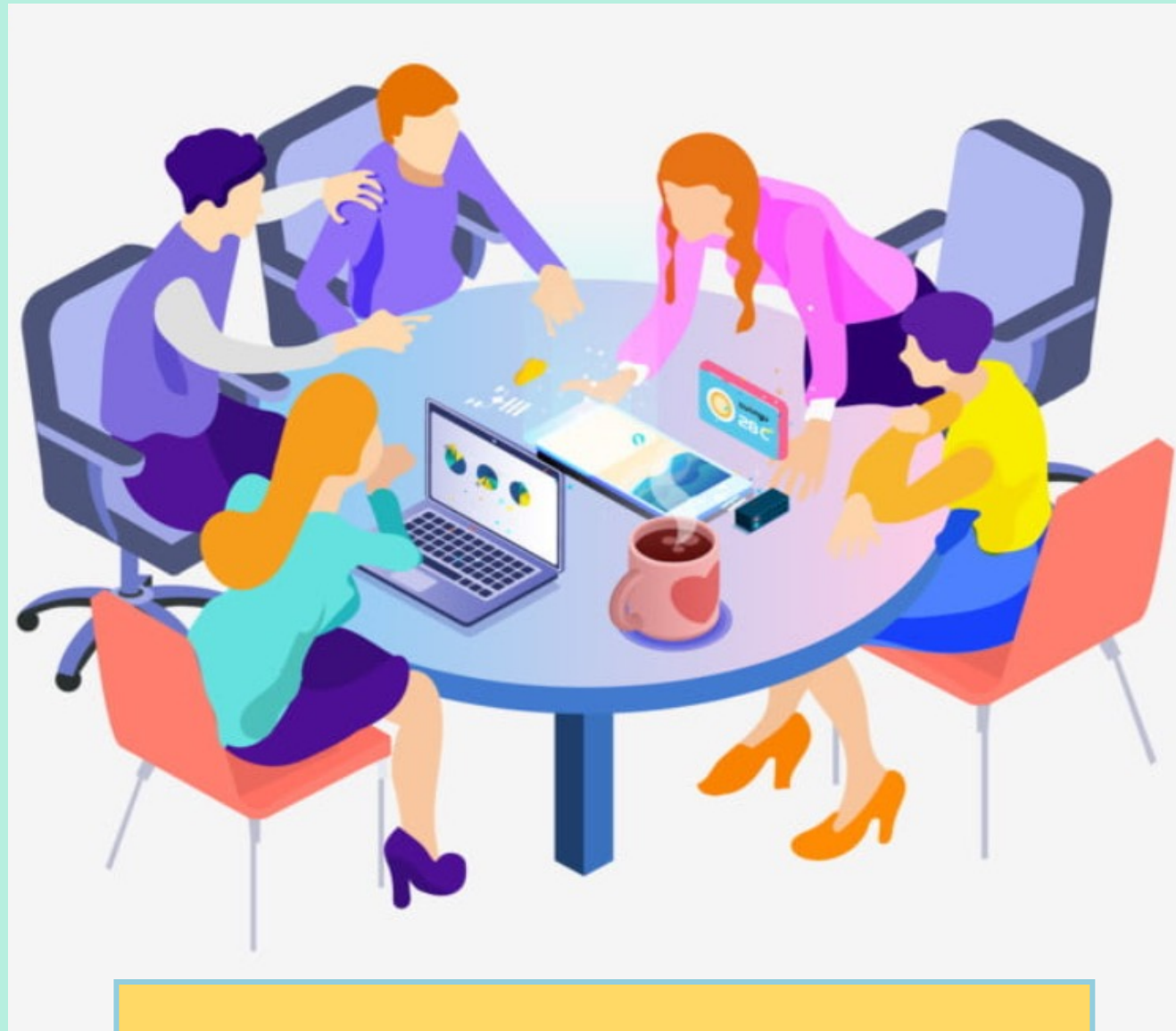
- Berorientasi Hasil
- SMART
  - *Specific* (Jelas, tidak berdwimakna)
  - *Measureable* (dapat diukur)
  - *Achievable/Attainable* (dapat diraih)
  - *Relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur)
  - *Time Bound* (memiliki batasan waktu pengukuran)

Target

- Tren/ capaian periode sebelumnya
- Target Nasional/ Target tingkat yang lebih tinggi
- Selaras

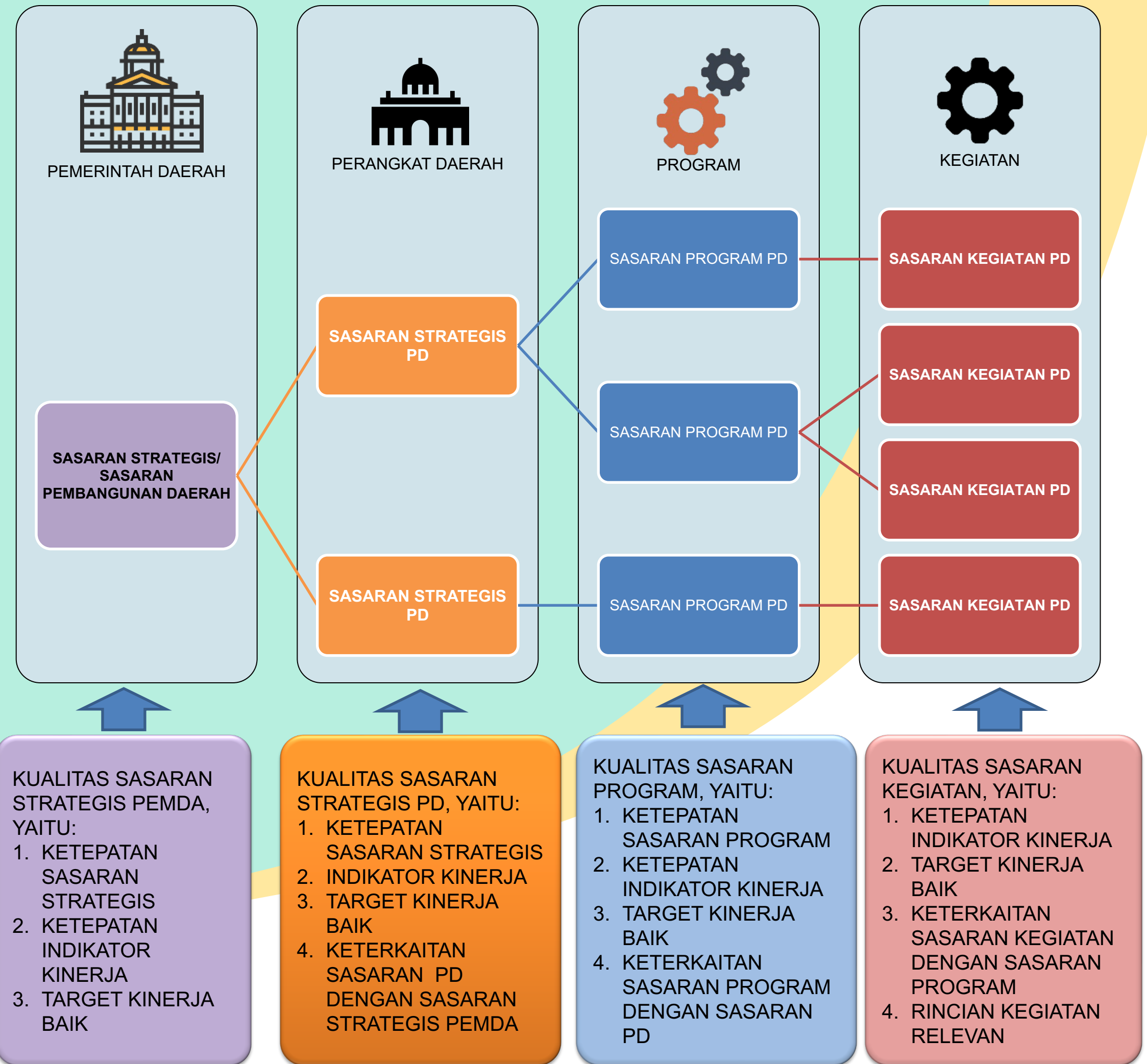


# PENETAPAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH



## Sumber Dokumen:

- PK Kepala Daerah
- PK Kepala PD s.d Pengelola Kegiatan
- DPA PD



# SASARAN STRATEGIS PEMDA

## HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Berorientasi hasil atau dampak yang dirasakan masyarakat.
2. Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah daerah.
3. Sesuai dengan prioritas daerah.
4. Sesuai dengan isu strategis daerah.
5. Selaras dengan perencanaan yang lebih tinggi.

## CONTOH SASARAN STRATEGIS

• Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten ABC



• Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan



• Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten ABC





# MENETAPKAN INDIKATOR KINERJA

Pentingnya Indikator Kinerja dan Target, digunakan untuk :

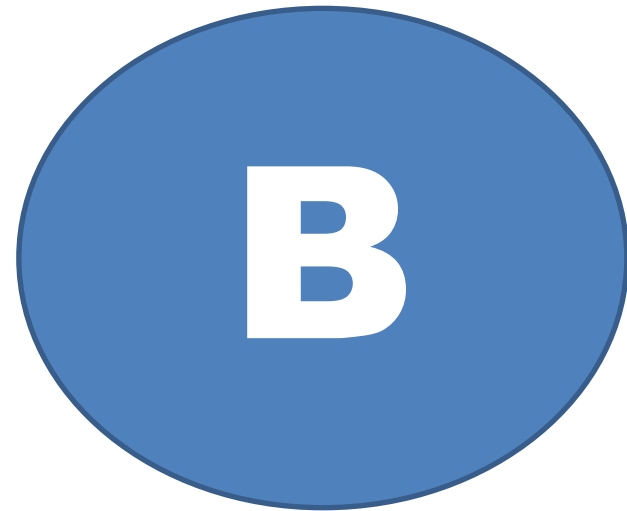
1. Mengukur keberhasilan
2. Dasar pemberian *Reward and Punishment*

Syarat Indikator Kinerja yang baik:

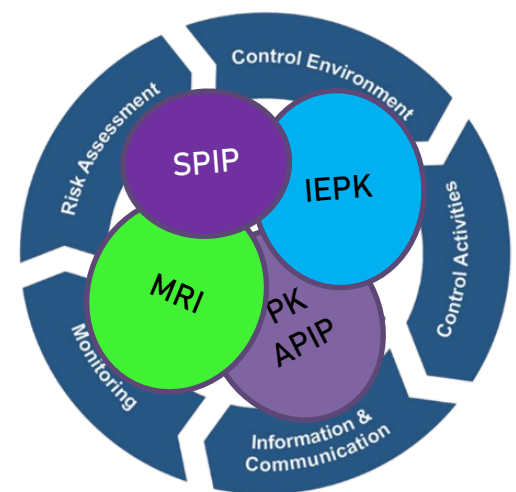
1. Berorientasi Hasil
2. SMART
  - *Spesific* (Jelas, tidak berdwimakna)
  - *Measureable* (dapat diukur)
  - *Achievable/Attainable* (dapat diraih)
  - *Relevant* (relevan dengan kinerja yang ingin diukur)
  - *Time Bound* (memiliki batasan waktu pengukuran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
Menurunnya kemiskinan	Jumlah paket bantuan sosial	
Menurunnya kemiskinan	Persentase penurunan jumlah masyarakat miskin	





# **STRUKTUR DAN PROSES**



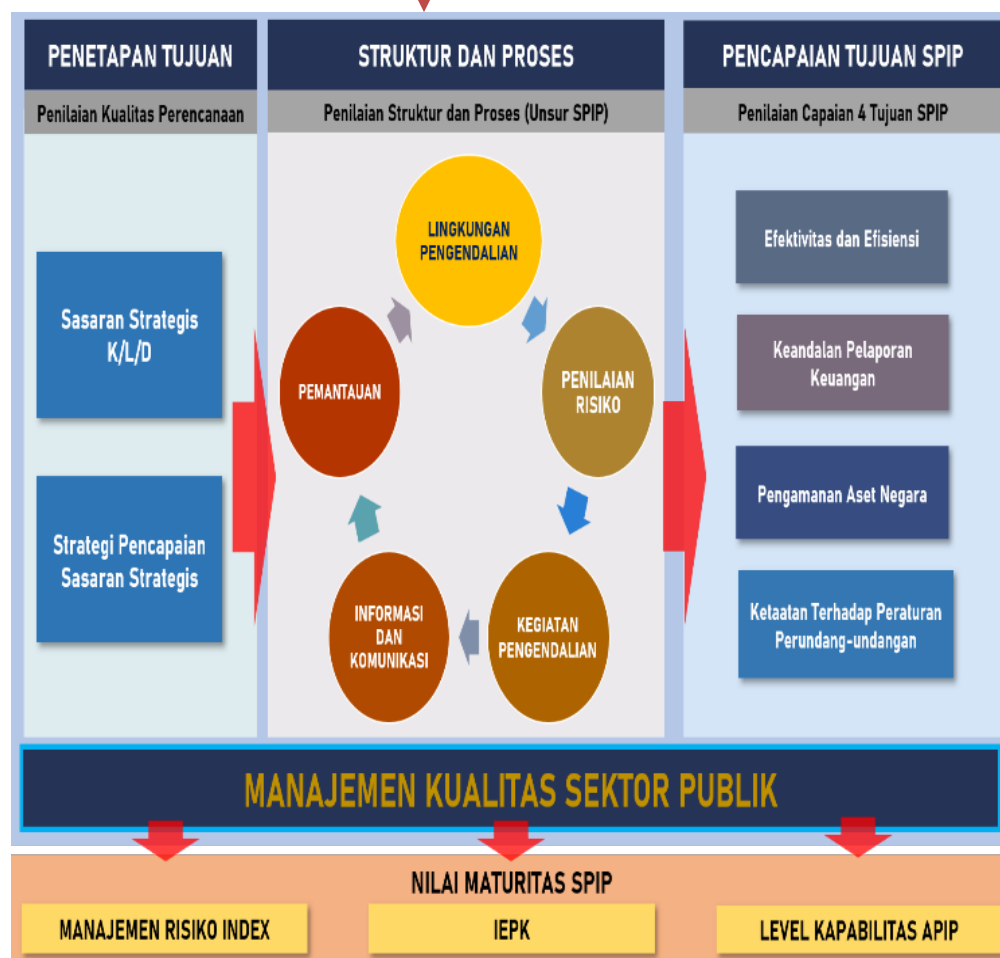
# PEMBOBOTAN PENILAIAN

**PENILAIAN  
STRUKTUR DAN  
PROSES  
MERUPAKAN  
PENILAIAN  
PARAMETER SUB  
UNSUR SPIP  
MENCAKUP  
PARAMETER MRI  
SERTA IEPK.  
MEMILIKI BOBOT  
30% DARI TOTAL  
PENILAIAN.**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40.00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100.00%</b>	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30.00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>30.00%</b>
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	<b>100.00%</b>	

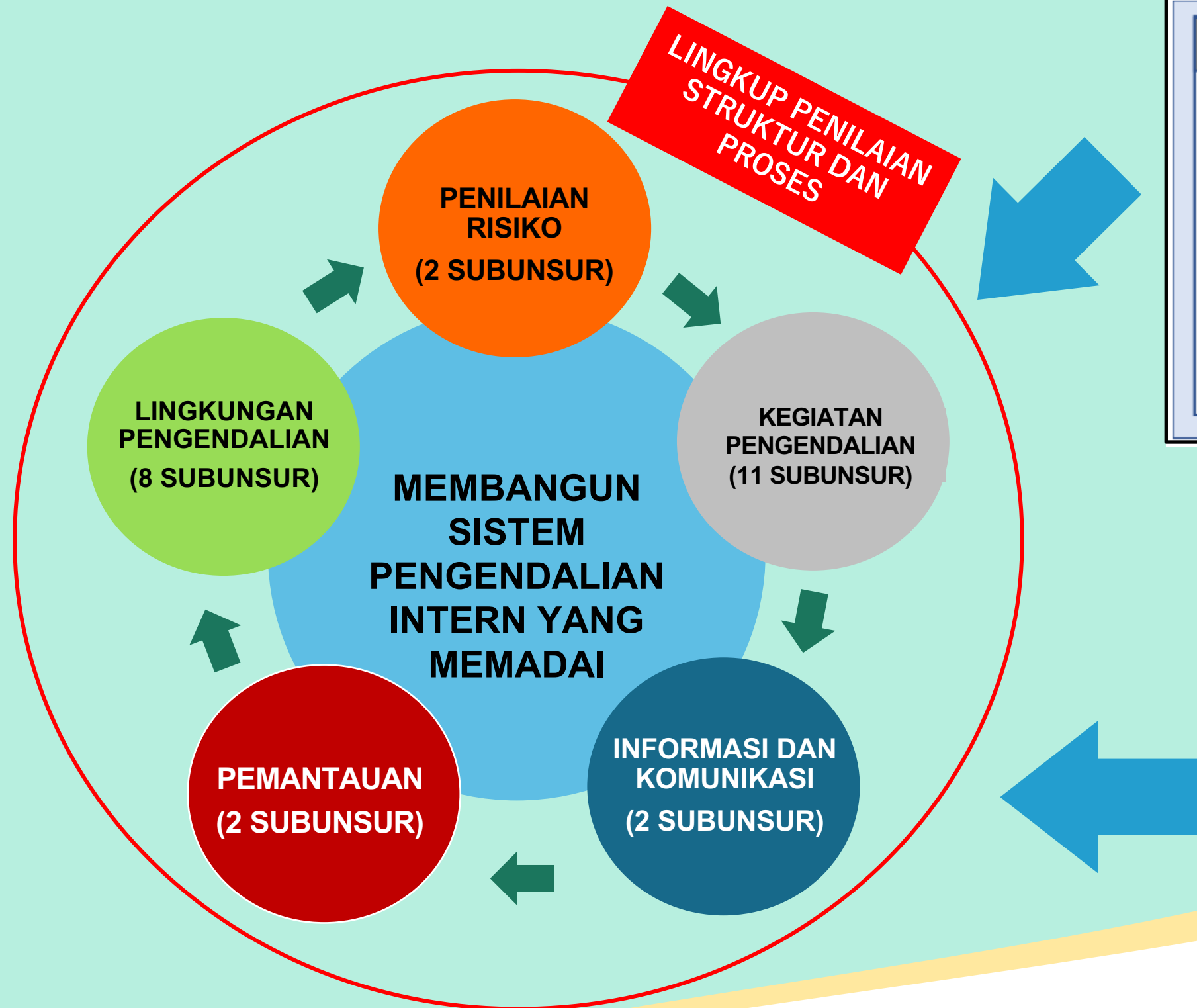
# PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP

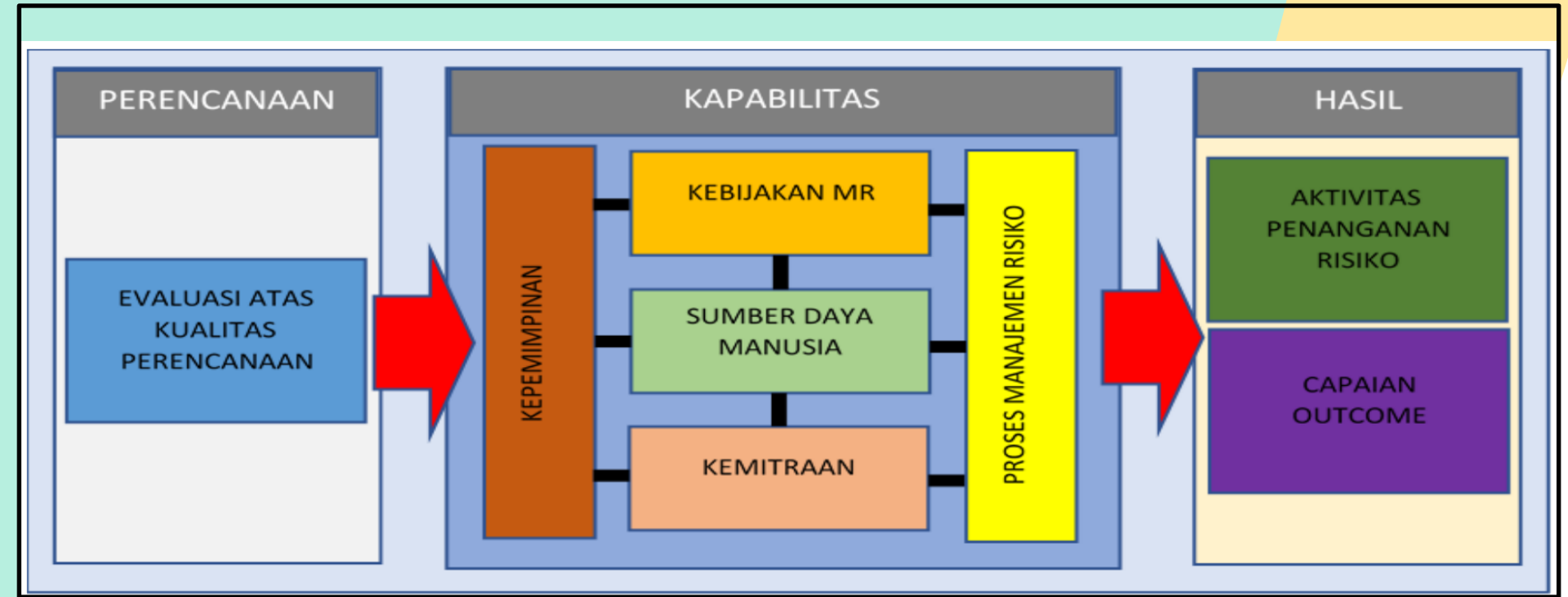


- 1 Pemenuhan parameter subunsur SPIP
- 2 Pemenuhan parameter subunsur MRI
- 3 Pemenuhan parameter subunsur IEPK

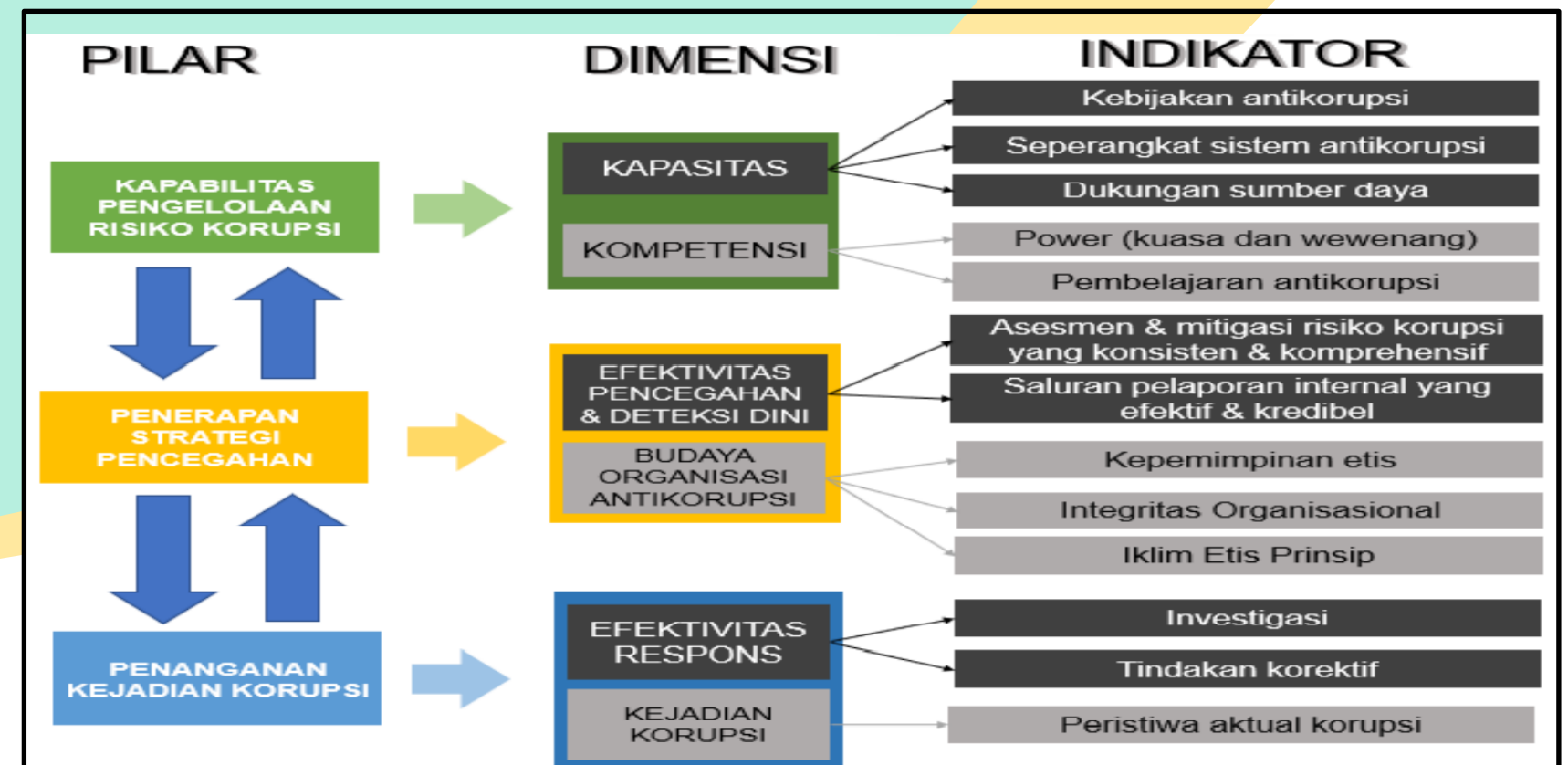
# PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES



## MRI



## IEPK



# SUBUNSUR STRUKTUR DAN PROSES



ALAT  
PENILAIAN  
MANDIRI

# STRUKTUR DAN PROSES

KERTAS KERJA  
TUJUAN 1

KERTAS KERJA  
TUJUAN 2

KERTAS KERJA  
TUJUAN 3

KERTAS KERJA  
TUJUAN 4

DISIMPULKAN MENJADI  
SKOR STRUKTUR DAN  
PROSES DI KERTAS  
KERJA LEAD II



Efektivitas dan  
Efisiensi  
Pencapaian Tujuan  
Organisasi

Keandalan  
Pelaporan  
Keuangan

Pengamanan Aset  
Negara

Ketaatan terhadap  
Peraturan  
Perundang-  
undangan

PARAMETER DALAM  
SETIAP SUBUNSUR  
DIARAHKAN KE EMPAT  
TUJUAN SPIP

SPIP  
MRI

SPIP  
MRI

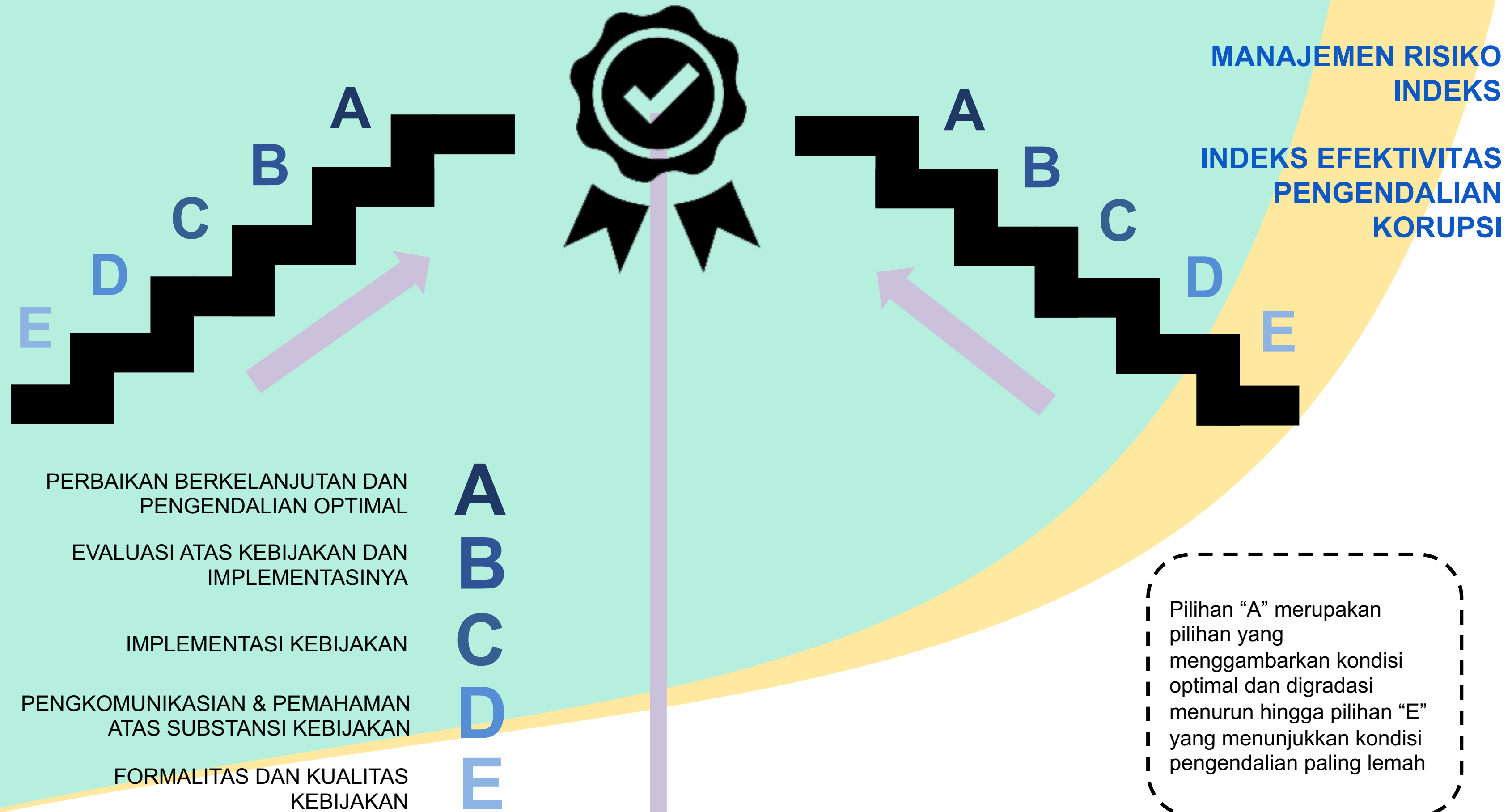
SPIP  
MRI

SPIP  
MRI  
IEPK

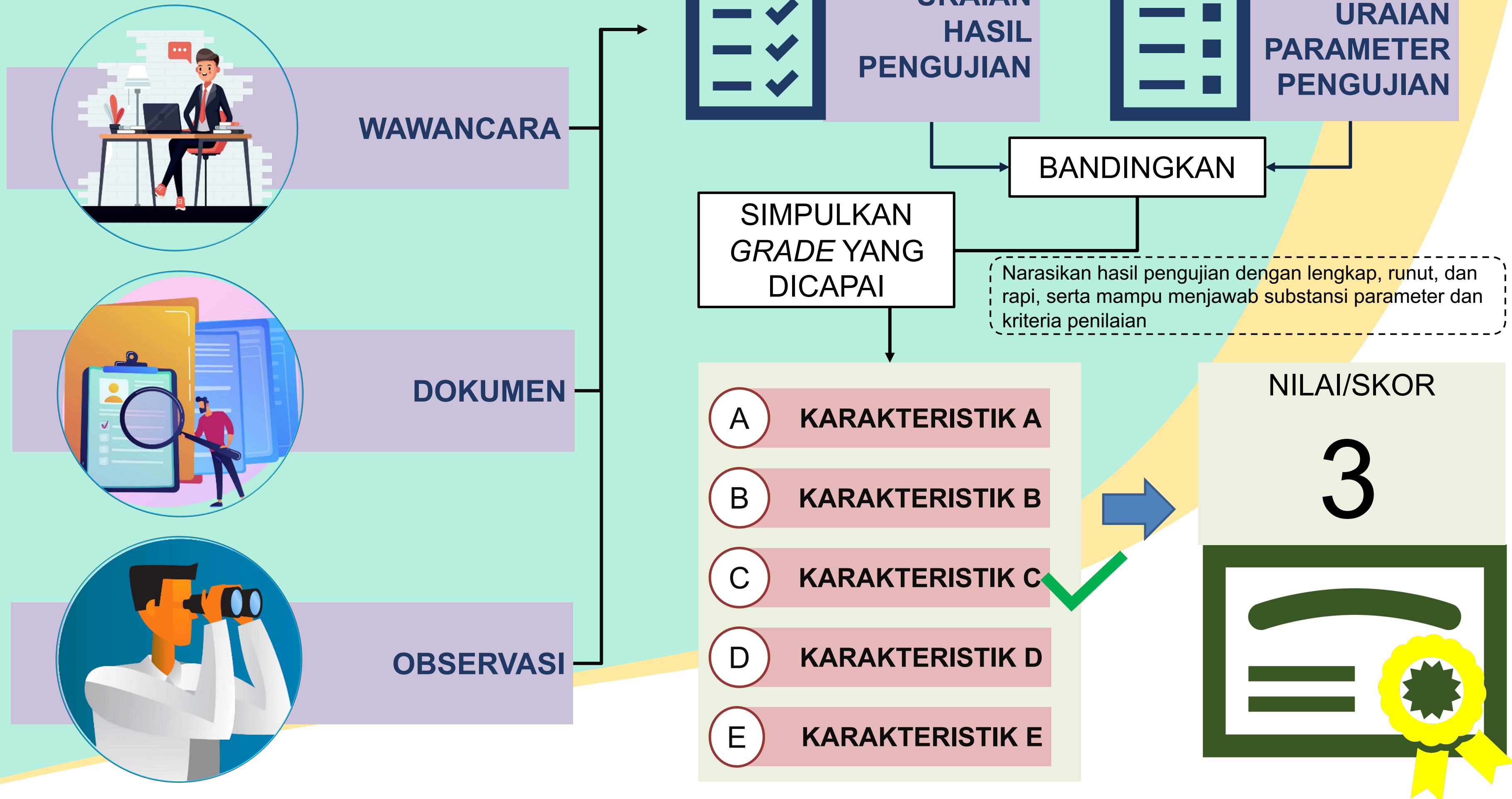
PARAMETER DALAM  
SETIAP SUBUNSUR  
MEMUAT KRITERIA-  
KRITERIA PENILAIAN  
MRI DAN IEPK

# PILIHAN JAWABAN STRUKTUR DAN PROSES

SPIP



# ALUR PENYIMPULAN

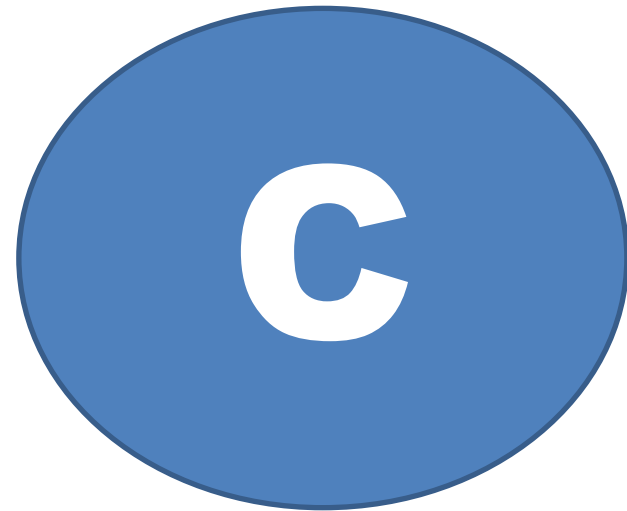




# CONTOH KERTAS KERJA DAN PENYIMPULAN HASIL PENGUJIAN T1

No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Grade	Kriteria	Penjelasan	Cara Pengujian	Hasil Pengujian Satker 1	Hasil Pengujian Satker 2	Hasil Pengujian Satker 3	Kesimpulan Akhir (Y/T)
		SPIP	MRI	IEPK								
1.1	<b>Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>											3
1	K/L/D menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	V	-	-	A	.....	.....	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	-	-	B	.....	.....	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi	(..narasi..) Simpulan: Y	<b>MODUS</b>		
		V	-	-	C	.....	.....	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi		(..narasi..) Simpulan: Y	(..narasi..) Simpulan: Y	Y
		V	-	-	D	.....	.....	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				
		V	-	-	E	.....	.....	Wawancara/ Dokumentasi/ Observasi				



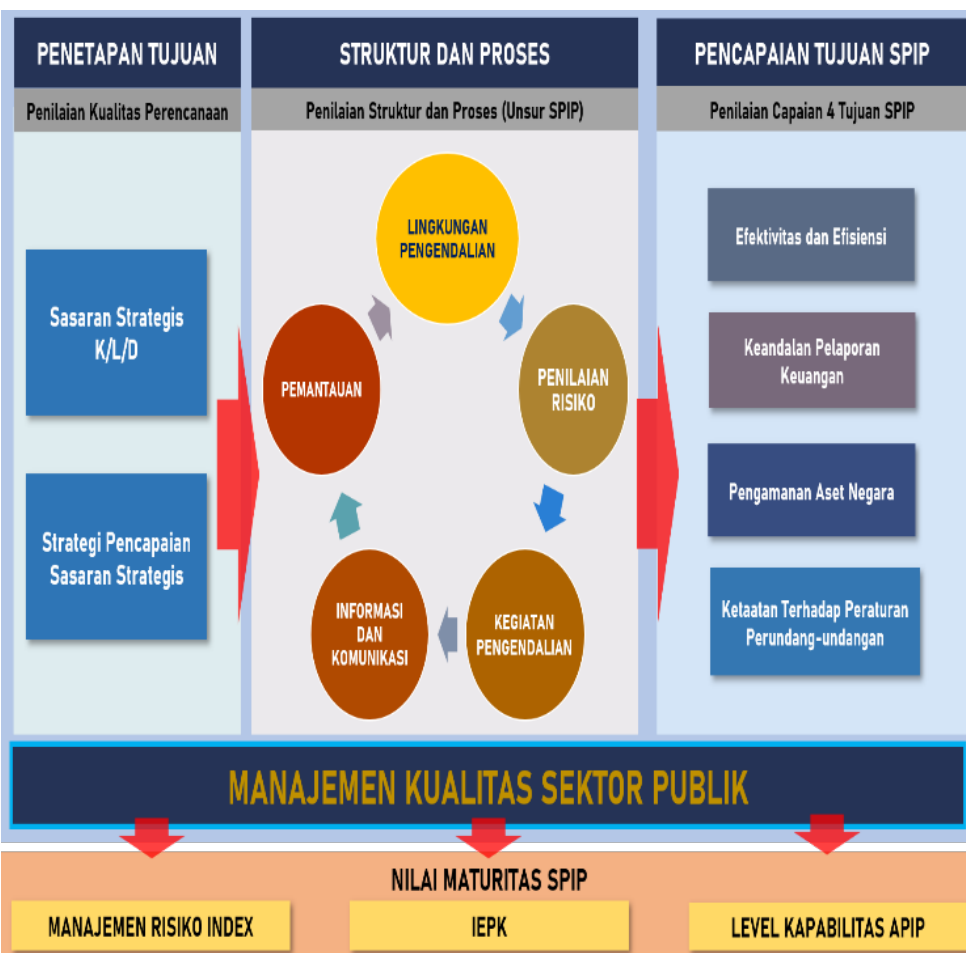


# PENCAPAIAN TUJUAN



# PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN

Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada K/L/D yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu:

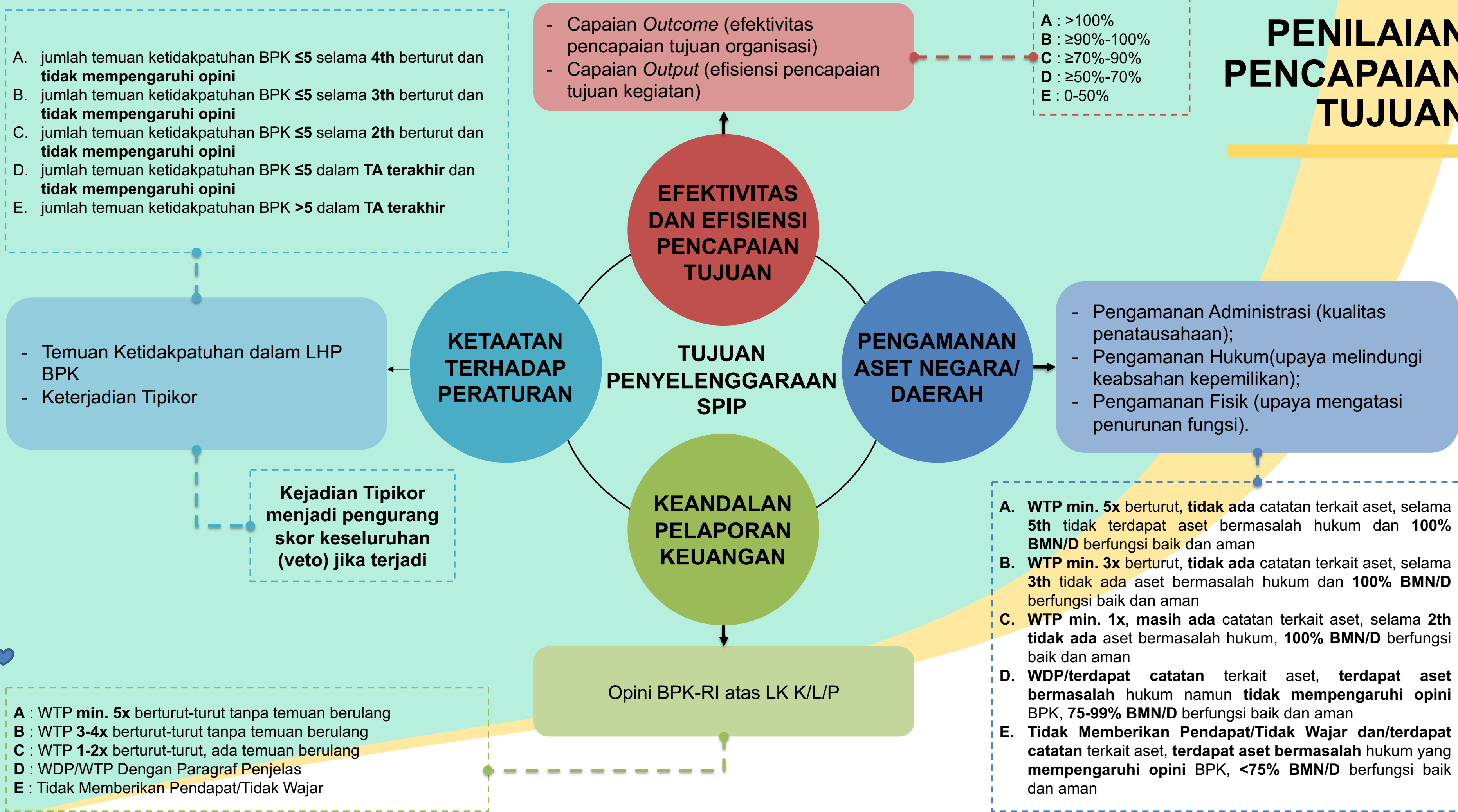


1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi
2. keandalan pelaporan keuangan
3. pengamanan aset negara
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

**PENILAIAN  
PENCAPAIAN  
TUJUAN MEMILIKI  
BOBOT 30% DARI  
TOTAL PENILAIAN.**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur/ Subunsur	Bobot Komponen
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>		<b>40.00%</b>
Kualitas Sasaran Strategis	50.00%	
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50.00%	
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	100.00%	
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>		<b>30.00%</b>
<b>Lingkungan Pengendalian</b>		
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.75%	
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.75%	
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.75%	
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.75%	
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.75%	
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.75%	
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.75%	
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.75%	
<b>Penilaian Risiko</b>		
Identifikasi Risiko (2.1)	10%	
Analisis Risiko (2.2)	10%	
<b>Kegiatan Pengendalian</b>		
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.27%	
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.27%	
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.27%	
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.27%	
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.27%	
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.27%	
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.27%	
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.27%	
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	2.27%	
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	2.27%	
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.27%	
<b>Informasi dan Komunikasi</b>		
Informasi yang Relevan (4.1)	5%	
Komunikasi yang Efektif (4.2)	5%	
<b>Pemantauan</b>		
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	7.50%	
Evaluasi Terpisah (5.2)	7.50%	
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	100.00%	
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>		<b>30.00%</b>
<b>Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi</b>		
Capaian Outcome	15%	
Capaian Output	15%	
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>		
Opini LK	25%	
<b>Pengamanan atas Aset</b>		
Keamanan Administrasi	10%	
Keamanan Fisik	5%	
Keamanan Hukum	10%	
<b>Ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan</b>		
Temuan Ketaatan	20%	
<b>SUB JUMLAH HASIL</b>	100.00%	

# PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN



- A : >100%
- B : ≥90%-100%
- C : ≥70%-90%
- D : ≥50%-70%
- E : 0-50%

- A. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 4th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- B. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 3th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- C. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 selama 2th berturut dan **tidak mempengaruhi opini**
- D. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK ≤5 dalam TA terakhir dan **tidak mempengaruhi opini**
- E. jumlah temuan ketidakpatuhan BPK >5 dalam TA terakhir

Kejadian Tipikor menjadi pengurang skor keseluruhan (veto) jika terjadi

- A : WTP min. 5x berturut-turut tanpa temuan berulang
- B : WTP 3-4x berturut-turut tanpa temuan berulang
- C : WTP 1-2x berturut-turut, ada temuan berulang
- D : WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas
- E : Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar

- A. WTP min. 5x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 5th tidak terdapat aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- B. WTP min. 3x berturut, **tidak ada** catatan terkait aset, selama 3th tidak ada aset bermasalah hukum dan 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- C. WTP min. 1x, **masih ada** catatan terkait aset, selama 2th **tidak ada** aset bermasalah hukum, 100% BMN/D berfungsi baik dan aman
- D. WDP/terdapat **catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum namun **tidak mempengaruhi opini** BPK, 75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman
- E. **Tidak Memberikan Pendapat/Tidak Wajar dan/terdapat catatan** terkait aset, **terdapat aset bermasalah** hukum yang **mempengaruhi opini** BPK, <75% BMN/D berfungsi baik dan aman

# PERISTIWA KORUPSI



# PERISTIWA AKTUAL KORUPSI

## NEW SPIP

---

Digunakan sebagai pengurang nilai (penalti)

---

Berlaku bagi skor IEPK maupun SPIP (termasuk MRI)

---

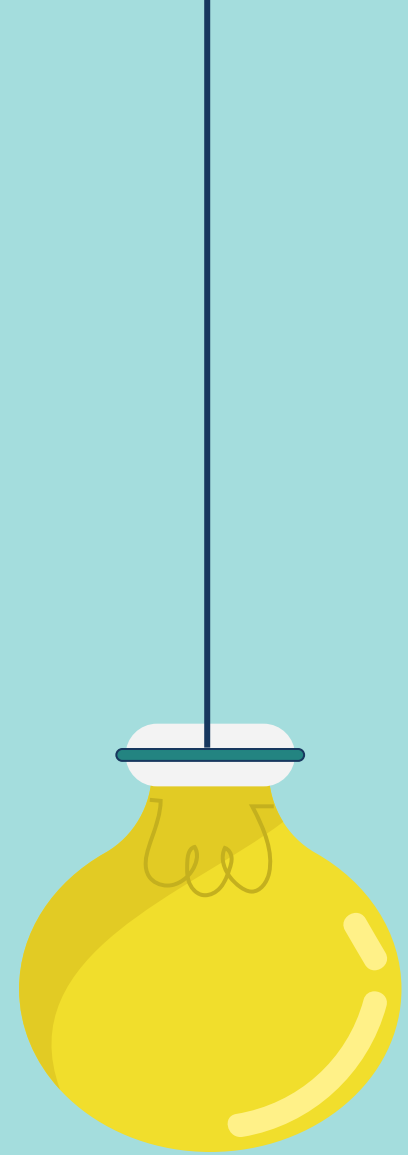
Kasus korupsi yang telah memasuki tahapan penuntutan sampai dengan putusan (*inkracht*), terkecuali kasus hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang langsung dapat dijadikan dasar penalti

---

Identifikasi waktu terjadinya korupsi krusial untuk menentukan apakah tindakan korektif telah dilakukan sehingga mencegah terulangnya kasus yang sama, dan apakah efektivitas pengendalian pada saat periode penilaian masih dipengaruhi oleh kasus korupsi

---



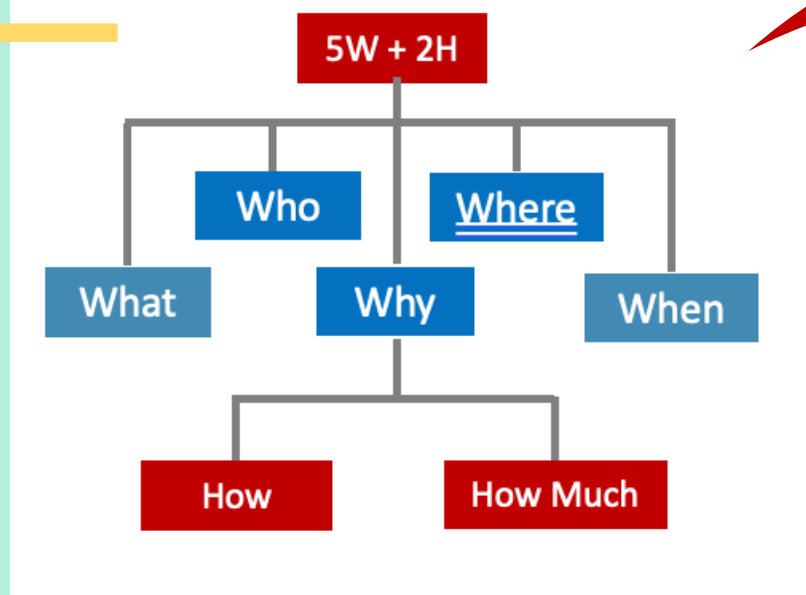


# PROSES PENALTI



# PROSES PENALTI

Analisis Kasus Korupsi



Klasifikasi Kasus

**Institusional**  
Dilakukan secara bersama-sama yaitu melibatkan pejabat dan staf K/L/D secara lintas hierarki dan/atau lintas fungsi

**Individual**  
Dilakukan oleh pribadi atau individu ASN tanpa melibatkan pihak lain, baik secara hierarki maupun lintas fungsi

SUMBER INFORMASI

- Informasi dari APH
  - Kasus Korupsi Berjalan
- Laporan Auditor Eksternal
  - BPK
- Laporan APIP
  - Inspektorat dan BPKP
- Media Massa
  - Isu yang berkembang di masyarakat (Informasi Tambahan/Penguat)



● Terhadap seluruh pilar dari IEPK

● Terhadap sub unsur SPIP dan MRI terkait dengan kasus korupsi

# METODE PENALTI

## Institusional

SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.4
1.3	3.7
1.5	3.8
1.6	3.9
1.7	3.10
1.8	3.11
2.1	4.1
2.2	5.1
3.2	5.2

## Individual

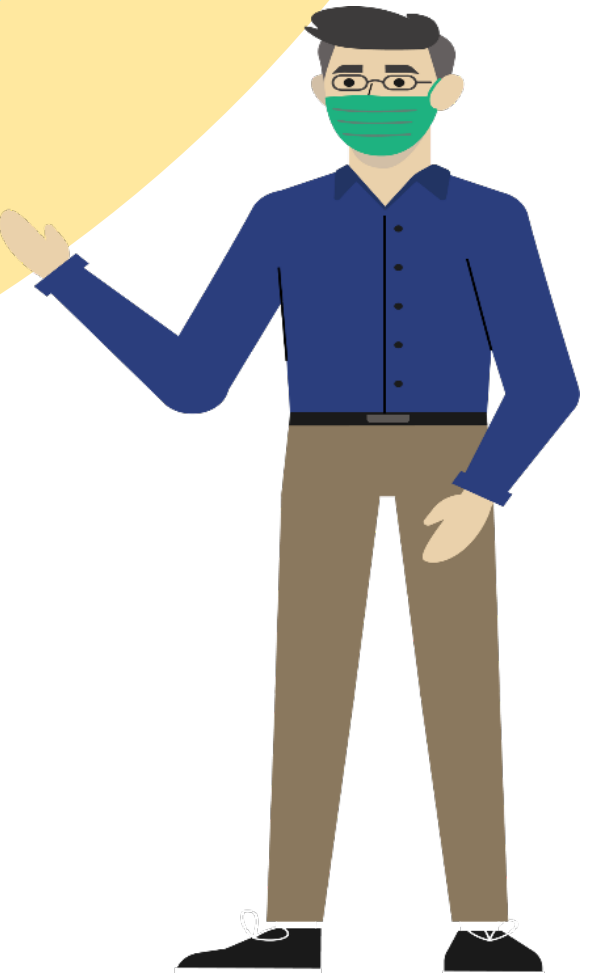
SUB UNSUR TERKAIT	
1.1	3.6
1.3	3.7
1.6	3.8
1.8	3.9
2.1	3.11
2.2	4.1
3.2	5.1
3.4	5.2

Penalti terhadap MRI bergantung pada sub unsur SPIP terkait

Penalti terhadap pilar-pilar IEPK menyesuaikan pada hasil analisis

Penalti dilaksanakan dengan menurunkan gradasi per parameter

Penurunan maksimal adalah sampai dengan kebijakan (Gradasi E) untuk SPIP



Catatan: Tabel di atas dapat digunakan sebagai referensi namun tidak membatasi Tim Penjamin Kualitas dalam menganalisis hubungan kausalitas dan melakukan pengurangan nilai pada sub unsur

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			2,75	TIDAK	2,75
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi			
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan	3		3,00
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset			
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku			
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	3		3,00
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	1		1,00
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	1		1,00
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	2		2,00
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	2		2,00
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	2		2,00
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	2		2,00

Kode	Uraian Subunsur	No	Uraian Parameter	KESIMPULAN NILAI	VETO (YA/TIDAK)	NILAI AKHIR
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			2,75	YA	1,75
1.1		1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi			
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan	3		1,75
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset			
			Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku			
1.1		2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	3		1,75
1.1		3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	1		1,75
1.1		4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	1		1,75
1.1		5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	2		1,75
1.1		6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	2		1,75
1.1		7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	2		1,75
1.1		8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	2		1,75

	STRUKTUR DAN PROSES	PENGURANGAN NILAI
I	<b>Lingkungan Pengendalian</b>	
	Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	YA
	Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	TIDAK
	Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	TIDAK
	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	TIDAK
	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	TIDAK
	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	TIDAK
	Perwujudan Peran AP/IR yang Efektif (1.7)	TIDAK
	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	TIDAK
II	<b>Penilaian Risiko</b>	TIDAK
	Identifikasi Risiko (2.1)	TIDAK
	Analisis Risiko (2.2)	TIDAK
III	<b>Kegiatan Pengendalian</b>	TIDAK
	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	TIDAK
	Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	TIDAK
	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	TIDAK
	Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	TIDAK
	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	TIDAK
	Pemisahan Fungsi (3.6)	TIDAK
	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	TIDAK
	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	TIDAK
	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	TIDAK
	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	TIDAK
	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	TIDAK
IV	<b>Informasi dan Komunikasi</b>	TIDAK
	Informasi yang Relevan (4.1)	TIDAK
	Komunikasi yang Efektif (4.2)	TIDAK
V	<b>Pemantauan</b>	TIDAK
	Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	TIDAK
	Evaluasi Terpisah (5.2)	TIDAK

- Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih besar dari nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut menjadi sama dengan nilai subunsur.

- Apabila nilai parameter MRI dan pilar IEPK sebelum dikurangkan adalah lebih kecil atau sama dengan nilai subunsur terkait setelah diturunkan nilainya, maka nilai dari parameter MRI dan pilar IEPK tersebut tidak berubah.



# **PANDUAN PENGAWASAN SPIP TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH APP TRIWULAN I TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**Analisis daya ungkit dan keberhasilan implementasi pengendalian intern Pemerintah Daerah dalam perspektif efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.**

1. Apakah target sasaran strategis Tahun 2020 sd 2022 telah tercapai?
2. Apakah terjadi peningkatan capaian atas target sasaran strategis selama 3 tahun terakhir (2020 sd 2022)?
3. Apakah terdapat peningkatan hasil penilaian selama 3 tahun terakhir (2020 sd 2022) atas:
  - a) Efektivitas dan Efisiensi organisasi: (1) SAKIP (2) Indeks SPBE
  - b) Keandalan laporan keuangan: Opini LKPD
  - c) Pengamanan Aset: (1) Opini dan Temuan LKPD (2) Indeks Pengelolaan Aset
  - d) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan: (1) Indeks Persepsi Korupsi (IPK) (2) Survey Penilaian Integritas (SPI) (3) Reformasi Birokrasi (RB) (4) MCP KPK (5) EKPPD
4. Bagaimana kondisi permasalahan yang tergambar dalam Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD dalam 3 tahun terakhir (2020 sd 2022), serta Hasil Pengawasan BPKP, APIP Daerah, maupun sumber lain (APH, current issue, dll)

## METODE DAN TEKNIK ANALISIS ANALISIS

- Deskriptif statistik/analisis tren, misalnya: regresi/korelasi
- Kualitatif (pendekatan diagnostik/reflektif) dengan *root cause analysis* dan/atau gap analysis.

**Catatan:**  
**Pencapaian Tujuan berdasarkan data capaian riil (Capaian Sastra, Indikator/Indeks terkait, Hasil Pengawasan BPKP, Data LHP BPK, dan sebagainya; bukan berdasarkan skor/capaian elemen PCT pada Evaluasi SPIP-T.**

## CONTOH ANALISIS DAN STORYLINE

### KUALITATIF

- ✓ Analisis (dengan ilustrasi konkret) yang menggambarkan hubungan penyelenggaraan SPIP-T terhadap tercapainya kinerja organisasi K/L/D yang efektif dan efisien. Contoh: Bagaimana proses monitoring dan reviu kinerja berkontribusi langsung terhadap efisiensi anggaran dan pencapaian keluaran/hasil program?.
- ✓ Analisis (dengan ilustrasi konkret) yang menggambarkan hubungan penyelenggaraan SPIP-T terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan/pelaporan keuangan dan aset K/L/D. Contoh: Bagaimana dokumentasi transaksi, pencatatan aset, dan penggunaan sistem informasi meningkatkan akurasi dan transparansi pengelolaan keuangan/aset?
- ✓ Analisis (dengan ilustrasi konkret) yang menggambarkan hubungan penyelenggaraan SPIP-T terhadap perbaikan kepatuhan dan penurunan *fraud* pada K/L/D. Contoh: Bagaimana implementasi WBS dan *early warning* menurunkan potensi keterjadian penyalahgunaan wewenang?

### STATISTIK DESKRIPTIF

- ✓ Deskriptif Statistik untuk mendukung Hipotesis: Implementasi Pengendalian Intern dan MR yang optimal akan berpengaruh pada perbaikan pencapaian tujuan; dapat dilakukan dengan melihat hubungan antara capaian skor/maturitas SPIP/MR dengan tercapainya tujuan
- ✓ Kemudian, dapat menguraikan infrastruktur Pengendalian Intern dan MR apa saja yang berhasil dibangun oleh Pemda dengan pencapaian tujuan yang baik; Sebaliknya, dapat menguraikan kelemahan pengendalian intern dan MR yang harus diperbaiki pada Pemda dengan pencapaian tujuan buruk;
- ✓ Apabila ternyata secara kuantitatif bertolak belakang; misalnya: capaian SPIP/MR buruk tapi Tujuan tercapai dengan baik; Kondisi ini juga dapat dijadikan cerita menarik: diuraikan ada kondisi apa pada pemda terkait yang menyebabkan anomali ini bisa terjadi. Contoh: walaupun kebijakan dan struktur SPIP/MR secara umum jelek, tujuan tercapai karena daerah tersebut ditopang oleh kekayaan Sumber Daya.
- ✓ Demikian sebaliknya, pada Pemda dengan capaian SPIP/MR baik tapi pencapaian tujuan buruk, dapat diceritakan apa yang menjadi hambatan. Angle lain, dapat diceritakan, bagaimana kualitas implementasi SPIP/MR nya, mengapa belum dapat secara efektif mengawal pencapaian tujuan.

### Potret dan analisis ketercapaian maturitas SPIP-T

1. Bagaimana tren capaian SPIP, MRI dan IEPK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2021 sd 2023)?
2. Bagaimana awareness/komitmen dari Pimpinan Pemda dalam penyelenggaraan SPIP dan penerapan MR:
  - a) Apakah Pemda telah memiliki kebijakan penyelenggaraan SPIP dan penerapan MR?
  - b) Apakah Penyelenggaraan SPIP dan Penerapan MR ditetapkan sebagai IKU oleh Pemda?
  - c) Apakah telah tersedia anggaran untuk penyelenggaraan SPIP dan penerapan MR?
  - d) Apakah Pemda telah memberikan pelatihan bagi pegawai terkait dengan SPIP dan MR?
3. Bagaimana capaian komponen Penetapan Tujuan, Struktur Proses, Pencapaian Tujuan dalam 2 tahun terakhir (2022 dan 2023)?

### CONTOH ANALISIS DAN STORYLINE

- ✓ Profil dan sebaran maturitas SPIP-T Pemda
- ✓ Analisis tren capaian maturitas SPIP-T Pemda dibandingkan dengan target nasional dan RPJMN.
- ✓ Analisis tren kelemahan/permasalahan penyelenggaraan SPIP-T Pemda pada setiap komponen dan unsur/subunsur.
- ✓ Analisis tren tindak lanjut rekomendasi perbaikan (Area of Improvement).
- ✓ Agenda dan strategi pencapaian target nasional.
- ✓ Permasalahan/tantangan/hambatan pembinaan SPIP-T Pemda.
- ✓ Efektifitas upaya perbaikan pengendalian intern terhadap peningkatan pencapaian tujuan; dapat dilihat dari persentase TL atas Aol dalam kaitannya dengan:
  - peningkatan capaian maturitas SPIP/MR
  - Peningkatan pencapaian tujuan

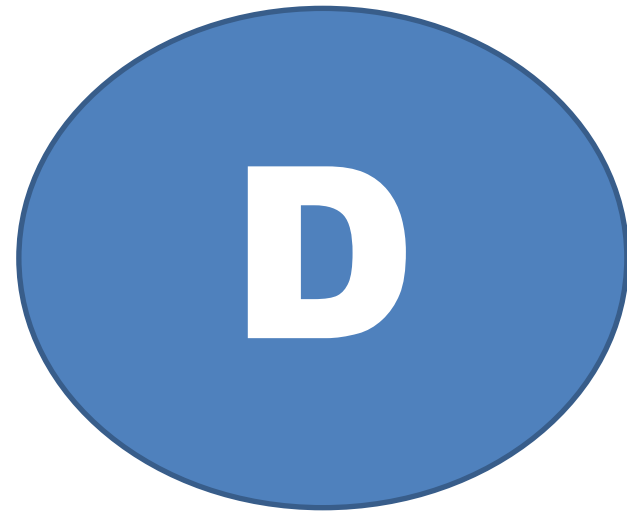
### METODE DAN TEKNIK ANALISIS

#### Metode: *Mixed method*

- Deskriptif statistik/analisis tren, misalnya: regresi/korelasi/
- Kualitatif (pendekatan diagnostik/reflektif) dengan *root cause analysis* dan/atau gap analysis.

#### Catatan:

Pencapaian Tujuan berdasarkan data capaian riil (Capaian Sastra, Indikator/Indeks terkait, Hasil Pengawasan BPKP, Data LHP BPK, dan sebagainya; bukan berdasarkan skor/capaian elemen PCT pada Evaluasi SPIP-T.



# APLIKASI E-SPIP





# Menu Aplikasi E-SPIP

## **Menu Referensi**

Menu digunakan oleh Admin Pemda untuk menambahkan pegawai yang bekerja di pemerintah daerah.

## **Menu Penilaian Mandiri**

Menu yang digunakan oleh Asessor Pemda atau Asessor Satker untuk menilai Maturitas SPIP

## **Menu Penjaminan Kualitas**

Menu yang digunakan oleh Tim Penjamin Kualitas



# PERAN DALAM APLIKASI

## **PENILAIAN MANDIRI**

Admin Pemda

Aessor Pemda

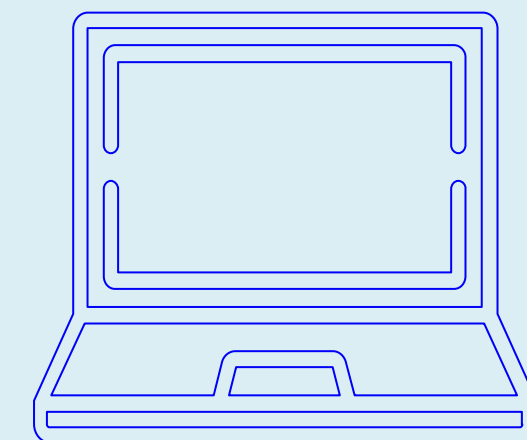
Aessor Satker

## **PENJAMINAN KUALITAS**

Admin Pemda

Tim PK Pemda

Tim PK Satker





# PERAN PENILAIAN MANDIRI

## 1 Admin Pemda

- Input Data Pegawai Tim PM
- Mempersiapkan PM dan Menyusun Surat Tugas PM
- Submit PM

## 3 Asessor Satker

PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI, meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan

## 2 Asessor Pemda

- Terdiri dari Asesor Keuangan, Asesor Aset, dan Asesor Ketaatan
- PERSIAPAN PENILAIAN MANDIRI, meliputi: Data Perencanaan, Opini BPK, dan Anggaran Satker
- PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI, meliputi: Penilaian Penetapan Tujuan Pemda dan Pencapaian Tujuan



# PERAN PENJAMINAN KUALITAS

## 1 Admin Pemda

- Input Data Pegawai Tim PK
- Menyusun Surat Tugas PK
- Memilih Sastra untuk PK

## 3 Tim PK Satker

PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS, meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan

## 2 Tim PK Pemda

- PELAKSANAAN PENJAMINAN KUALITAS, meliputi: PK Penetapan Tujuan Pemda dan Pencapaian Tujuan
- PERBAIKAN AREA PENGENDALIAN



# PENILAIAN MANDIRI PADA APLIKASI E-SPIP

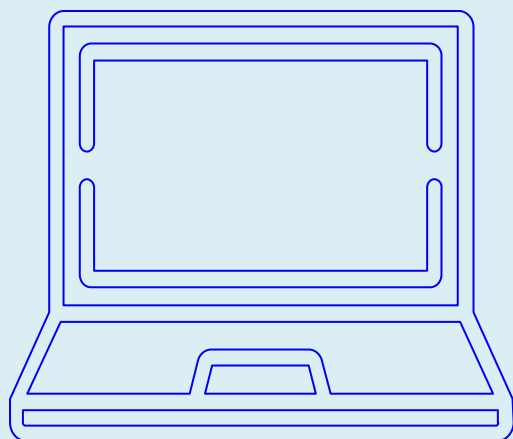
Admin Pemda perlu membuat 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan Penilaian Mandiri Tahun 2023, sebagai berikut:

- . Tahun 2022 (T-1) sebagai tahun atas Penilaian Komponen Pencapaian Tujuan
- . Tahun 2023 (T) sebagai tahun atas Penilaian Komponen Penetapan Tujuan dan Penilaian Komponen Struktur dan Proses



# Akses Aplikasi E-SPIP

- <http://spipterintegrasi.bpkp.go.id/spip/spip-ng/webmanager/login>
- Username : NIP masing-masing
- Password : bpkpb3r3t1k4



**TERIMA KASIH!**